



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 12981-12989

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia

Yusuf Daeng^{1✉}, Samson H. Sitorus², Awi Ruben³, Dwi Frananta Tarigan⁴, Surya Prakasa⁵

Universitas Lancang Kuning

Email: yusufdaeng23@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan yang membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Artikel ini mengeksplorasi peran dan tantangan SDM dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara mendalam dengan praktisi hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, sangat dipengaruhi oleh pendidikan, pelatihan, dan etika profesional. Kesenjangan dalam kompetensi dan integritas SDM penegak hukum dapat menghambat proses penegakan hukum dan keadilan. Artikel ini juga mengidentifikasi bahwa kurangnya sumber daya, seperti fasilitas dan teknologi, serta tekanan eksternal dan internal, dapat mempengaruhi kinerja SDM penegak hukum. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana, diperlukan reformasi yang komprehensif dalam pengembangan dan pengelolaan SDM, termasuk peningkatan kualitas pendidikan hukum, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan sistem pengawasan serta akuntabilitas. Dengan demikian, SDM yang kompeten dan berintegritas tinggi diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem penegakan hukum yang adil dan efektif di Indonesia.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum Pidana, Sumber Daya Manusia, Kualitas Penegak Hukum.*

Abstract

Criminal law enforcement is an important pillar in the justice system which requires quality human resources (HR). This article explores the role and challenges of human resources in criminal law enforcement in Indonesia. This research uses a qualitative approach with literature study methods and in-depth interviews with legal practitioners. Research findings show that the quality of law enforcement, including judges, prosecutors, and police, is greatly influenced by education, training, and professional ethics. Gaps in the competency and integrity of law enforcement human resources can hinder the process of law enforcement and justice. This article also identifies that a lack of resources, such as facilities and technology, as well as external and internal pressures, can affect the performance of law enforcement human resources. To increase the effectiveness of criminal law enforcement, comprehensive reform is needed in the development and management of human resources, including improving the quality of legal education, continuous training, and strengthening monitoring and accountability systems. Thus, it is hoped that competent human resources with high integrity can encourage the creation of a fair and effective law enforcement system in Indonesia.

Keywords: *Criminal Law Enforcement, Human Resources, Quality of Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana merupakan aspek krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Keberhasilan sistem peradilan pidana (Erna Dewi, 2010) sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat, termasuk hakim, jaksa, polisi, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Kualitas SDM ini mencakup pendidikan, keterampilan, integritas, dan etika profesional yang dimiliki oleh setiap penegak hukum.

Namun, di Indonesia, penegakan hukum pidana seringkali menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan aspek SDM (Vivi Ariyanti, 2019). Kesenjangan dalam pendidikan dan pelatihan, kurangnya fasilitas dan teknologi pendukung, serta tekanan eksternal dan internal seringkali mempengaruhi kinerja dan integritas penegak hukum. Beberapa kasus yang mencuat di media menunjukkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan penegak hukum, yang semakin memperburuk citra lembaga peradilan di mata masyarakat (Budi Agus Riswandi, 2016).

Selain itu, pengembangan SDM dalam penegakan hukum pidana juga sering terhambat oleh minimnya anggaran, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya dukungan kebijakan yang komprehensif. Pendidikan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mencetak lulusan yang siap terjun dan beradaptasi dengan tantangan nyata di lapangan. Program pelatihan yang tersedia pun seringkali tidak berkesinambungan dan tidak selalu relevan dengan kebutuhan actual (Angeline Xiao, 2018).

Dalam konteks ini, reformasi dalam pengelolaan dan pengembangan SDM menjadi suatu keharusan. Penguatan kualitas pendidikan hukum, peningkatan program pelatihan berkelanjutan, dan pengawasan yang ketat terhadap integritas penegak hukum menjadi langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum pidana dapat berjalan efektif dan adil. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas dan integritas SDM dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Selain itu dalam penelitian digunakan juga pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah sebuah proses yang kompleks dan multifaset yang bergantung pada berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu sumber daya manusia (SDM), kerangka hukum dan peraturan, infrastruktur dan teknologi, budaya dan etika, serta dukungan dari masyarakat dan lembaga internasional (Siti Merida Hutagalung, 2011). Berikut adalah pembahasan panjang dan komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Kualitas pendidikan dan pelatihan penegak hukum merupakan faktor krusial dalam penegakan hukum yang efektif. Penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum, prosedur peradilan, dan hak asasi manusia (Subarsyah Sumadikara, 2010). Pendidikan formal yang kuat, dilengkapi dengan pelatihan praktis yang berkelanjutan, sangat diperlukan untuk memastikan penegak hukum memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan profesional dan adil.

Integritas dan etika profesional adalah pilar penting dalam penegakan hukum. Penegak hukum harus menunjukkan tingkat integritas yang tinggi untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, atau nepotisme (Soerjono Soekanto, 1983). Penerapan kode etik yang ketat dan pengawasan internal yang efektif dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa penegak hukum bertindak sesuai dengan standar profesional yang tinggi.

Pengalaman praktis dan kapasitas kerja juga sangat penting. Penegak hukum yang berpengalaman cenderung lebih efisien dan efektif dalam menangani kasus-kasus kompleks. Oleh karena itu, program pengembangan kapasitas dan bimbingan bagi penegak hukum junior perlu diperkuat untuk memastikan transfer pengetahuan dan keterampilan yang efektif.

Kerangka hukum yang jelas dan sesuai sangat penting untuk penegakan hukum yang efektif. Hukum harus dirumuskan dengan jelas, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, peraturan yang tidak sinkron atau saling bertentangan harus diidentifikasi dan diperbaiki untuk mencegah kebingungan dan interpretasi yang salah.

Kepastian hukum merupakan elemen kunci yang menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif (Geofani Milthree Saragih, 2022). Hal ini membantu dalam menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kepastian hukum juga mengurangi peluang penyalahgunaan kekuasaan dan penafsiran hukum yang sewenang-wenang. Akses yang adil dan merata terhadap sistem hukum harus dijamin untuk semua lapisan masyarakat. Ini mencakup akses terhadap bantuan hukum, prosedur peradilan yang transparan, dan keputusan yang adil dan tidak memihak. Tanpa akses yang merata, penegakan hukum bisa menjadi bias dan tidak adil.

Fasilitas fisik seperti kantor polisi, pengadilan, dan penjara harus memadai dan dilengkapi dengan baik. Selain itu, sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana harus tersedia secara memadai untuk mendukung operasional yang efektif dari penegak

hukum (Mohd. Yusuf DM et al., 2023). Teknologi modern memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti database terintegrasi, sistem manajemen kasus, dan forensik digital, dapat membantu penegak hukum dalam menyelesaikan kasus dengan lebih cepat dan akurat.

Sistem pendukung yang efisien, termasuk logistik dan administrasi, sangat penting untuk mendukung operasional penegak hukum. Ini mencakup pengelolaan arsip yang baik, sistem komunikasi yang efektif, dan transportasi yang memadai untuk mobilitas penegak hukum. Budaya hukum masyarakat memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung lebih patuh terhadap hukum dan mendukung upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan sosialisasi peraturan hukum harus terus ditingkatkan untuk membangun budaya hukum yang kuat.

Norma dan nilai sosial yang berkembang di masyarakat juga mempengaruhi penegakan hukum. Penegak hukum harus peka terhadap norma dan nilai ini untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan harapan dan kepercayaan masyarakat. Etika profesi yang tinggi di kalangan penegak hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Pelanggaran etika dapat merusak citra dan kredibilitas penegak hukum serta mengurangi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting dalam penegakan hukum. Masyarakat yang mendukung upaya penegakan hukum akan lebih cenderung melaporkan kejahatan, memberikan informasi, dan bekerja sama dengan penegak hukum. Partisipasi ini dapat ditingkatkan melalui program-program edukasi dan sosialisasi hukum.

Kerjasama dengan lembaga internasional dapat membantu dalam memperkuat kapasitas penegakan hukum domestik. Bantuan teknis, pelatihan, dan pertukaran informasi dengan lembaga internasional dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan penegak hukum serta membantu dalam menangani kasus-kasus lintas negara. Pendanaan yang memadai dari pemerintah dan bantuan dari lembaga internasional sangat penting untuk mendukung program-program penegakan hukum. Pendanaan ini diperlukan untuk berbagai keperluan, mulai dari pelatihan dan pendidikan hingga pembangunan infrastruktur dan pembelian peralatan teknologi canggih.

Penegakan hukum adalah proses yang rumit yang memerlukan perhatian terhadap berbagai faktor yang saling berkaitan. Kualitas sumber daya manusia, kerangka hukum

dan peraturan yang jelas, infrastruktur yang memadai, budaya dan etika yang kuat, serta dukungan dari masyarakat dan lembaga internasional semuanya berperan penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki penegakan hukum harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan semua faktor ini secara bersamaan.

2. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan aspek vital dalam menjaga ketertiban sosial dan keamanan masyarakat. Proses penegakan hukum pidana melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi hukuman (Tony Yuri Rahmanto, 2019). Pentingnya penegakan hukum pidana tidak hanya terletak pada penanganan kasus-kasus kriminal yang telah terjadi, tetapi juga dalam mencegah terjadinya tindak pidana dengan memberikan efek jera bagi para pelaku. Dalam konteks ini, peran aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, sangatlah krusial. Mereka bertanggung jawab atas proses pengungkapan kasus, pembuktian di pengadilan, dan pengambilan keputusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku (Josua Gideon Kawenas, 2019).

Namun, penegakan hukum pidana juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai (Budi Handayono, 2020). Keterbatasan SDM dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kriminal, sedangkan infrastruktur yang kurang memadai dapat menghambat efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum. Selain itu, keberadaan korupsi dan kolusi di dalam lembaga penegak hukum juga dapat menghambat upaya penegakan hukum yang bersih dan adil.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya-upaya perbaikan dan penguatan sistem penegakan hukum pidana. Hal ini meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, peningkatan akses terhadap teknologi dan sarana pendukung lainnya, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas internal di dalam lembaga penegak hukum. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat juga merupakan langkah yang penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang efektif merupakan upaya bersama dari berbagai pihak untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan beradab.

3. Pentingnya Sumber Daya Manusia Dalam Penegakan Hukum

Sumber daya manusia (SDM) memegang peran kunci dalam penegakan hukum

yang efektif dan berkelanjutan (Dellyana Shant, 1988). Pertama-tama, kualitas SDM menentukan keberhasilan dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus kriminal. Petugas penegak hukum yang terlatih dengan baik akan mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, serta mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung proses peradilan. Selain itu, kualitas SDM juga mencakup pengetahuan tentang hukum dan etika yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya dengan integritas dan keadilan.

Kedua, kuantitas SDM juga menjadi faktor penting dalam menangani beban kerja yang semakin meningkat di bidang penegakan hukum. Jumlah personel yang memadai akan memungkinkan lembaga penegak hukum untuk memberikan respons yang cepat dan efektif terhadap kasus-kasus kriminal yang terjadi. Dengan SDM yang cukup, lembaga penegak hukum dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dan merespons berbagai macam kejadian kriminal dengan lebih baik (Sanyoto, 2008).

Namun, pentingnya SDM dalam penegakan hukum juga menimbulkan beberapa tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan antara jumlah dan kualitas SDM yang dibutuhkan dengan ketersediaan yang ada. Banyak lembaga penegak hukum mengalami kekurangan personel dan kurangnya anggaran untuk pelatihan dan pengembangan SDM. Hal ini dapat menghambat kemampuan lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara efektif.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, pengembangan sistem rekrutmen dan seleksi yang lebih transparan dan objektif, serta peningkatan fasilitas dan sarana pendukung lainnya. Selain itu, kerja sama antara lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, dan sektor swasta juga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas SDM dan menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Dengan demikian, investasi dalam pengembangan SDM di bidang penegakan hukum merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan berkeadilan (Konar Zuber, 2017).

SIMPULAN

Penegakan hukum pidana di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Kualitas SDM ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan formal, pelatihan praktis, pengalaman kerja, hingga integritas dan etika profesional. Saat ini, berbagai masalah seperti kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai, keterbatasan anggaran dan fasilitas, serta adanya praktik korupsi dan kolusi di kalangan penegak hukum menghambat efektivitas dan integritas sistem peradilan pidana. Misalnya, aparat penegak hukum yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang hukum dan prosedur peradilan sering kali tidak mampu menangani kasus secara profesional dan adil. Selain itu, kurangnya pengawasan dan kontrol internal membuat praktik korupsi sulit diberantas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi yang komprehensif dalam pengelolaan dan pengembangan SDM, termasuk peningkatan kualitas pendidikan hukum, program pelatihan berkelanjutan yang relevan, serta pengawasan ketat terhadap etika dan integritas penegak hukum. Pendekatan ini juga harus mencakup peningkatan kesejahteraan dan fasilitas kerja bagi para penegak hukum untuk mengurangi godaan korupsi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum pidana dapat berjalan lebih efektif, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat, sehingga menciptakan rasa aman dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angeline Xiao. (2018). Konsep Interaksi Sosial Dalam Komunikasi, Teknologi, Masyarakat. *Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 7(2), 94.
- Budi Agus Riswandi. (2016). Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3(23), 346.
- Budi Handayono. (2020). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana. *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* , 12(36).
- Dellyana Shant. (1988). Konsep Penegakan Hukum. Liberty,.
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). Metode Penelitian Hukum. Thafa Media.
- Erna Dewi. (2010). Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. *Pranata Hukum*, 5(2), 92.
- Geofani Milthree Saragih. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 6.

- Josua Gideon Kawenas. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Kesehatan. *Lex Crimen*, VIII(8), 31.
- Konar Zuber. (2017). Peran Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Unpal*, 15(3), 383.
- Mohd. Yusuf Dm, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, & Geofani Milthree Saragih. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulanmasyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 1936.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199.
- Siti Merida Hutagalung. (2011). Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum? *Sociae Polites*, 115.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Penegakan Hukum*. Bina Cipta.
- Subarsyah Sumadikara. (2010). *Penegakan Hukum*. Kencana Utama.
- Tony Yuri Rahmanto. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 32.
- Vivi Ariyanti. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis* , 6(2), 35.